

PEMBANGUNAN PARIWISATA INDONESIA BERDIMENSI
KERAKYATAN DAN BERWAWASAN EKO-BUDAYA:
BELAJAR DARI KASUS PARIWISATA BALI

Oleh
A.A NGR ANOM KUMBARA
Universitas Udayana

I .PENDAHULUAN

Berbagai negara di dunia sejak dua dasa warsa ini sangat serius merumuskan berbagai kebijakan untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai sektor andalan untuk meraup devisa dan penciptaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat . Kebijakan semacam itu diambil terkait dengan perkiraan bahwa jumlah wisatawan dunia meningkat secara signifikan..

Menurut data dan perkiraan, perkembangan jumlah wisatawan yang membanjiri pasar dunia dari tahun 1990-2010 akan terus meningkat. Pada tahun 1990 jumlah wisatawan dunis sebanyak 460 juta orang, dan pada tahun 2000 diperkirakan melonjak menjadi 702 juta orang . Angka ini diperkirakan akan meningkat lagi menjadi 1.018 juta orang pada tahun 2010 (Tourism Market Data Base,1996).

Menurut Gioffery Lipman salah seorang pejabat World Travel and Tourrism Council (WTTC) bahwa pada abad 21 ini akan terjadi gelombang wisatawan yang besar kepasar dunia dan negara-negara di Asia akan menjadi tujuan utama kunjungan wisatawan. Dengan demikian dapat diramalkan bahwa bisnis pariwisata di Asia sangat prospektif untuk menjadi industri besar, dan bahkan menurut prediksi John Naisbitt bahwa bisnis pariwisata akan mengarah menjadi industri terbesar di dunia.

Faktor utama yang mendorong wisatawan mengunjungi suatu negara tertentu adalah ingin menyaksikan keunikan kehidupan sosial-budaya dan religius masyarakat, kemudian menyusul faktor keindahan alam dan faktor lainnya seperti olah raga, mengunjungi keluarga, meeting, bisnis berobat dan sebagainya,

-
- Makalah ini dipresentasikan dalam Simposium dan Lokakarya Internasional Tgl 18-21 Juli 2001 di Universitas Andalang Padang Sumatra Barat dengan tema Globalisasi dan Kebudayaan Lokal: Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru.
 - Kerjasama dan sponsorship Universitas Indonesia, Universitas Andalas, Center for South East Asiaan Studies Kyoto University, Natioanl University of Singapore, Pemda TK I Sumatra Barat , The Japan Foundation dan The Ford Faundation.

Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang memiliki potensi pariwisata yang sangat besar baik dari segi keindahan alamnya maupun keunikan sosial budayanya, menaruh harapan pada pariwisata sebagai “komuditas ekspor” penghasil devisa terbesar kedua atau sekurang-kurangnya ketiga setelah migas. Harapan itu cukup beralasan karena, sejalan dengan pertumbuhan kunjungan wisman ke Indonesia penerimaan devisa dari sektor inipun terus meningkat. Pada tahun 1984 penerimaan devisa dari pariwisata adalah sebesar US\$ 519,7 juta dan pada tahun 1988 telah mencapai US\$1.194,1 juta. Pada tahun 1990 pariwisata mampu meraup devisa sebesar 1,89 milyar dolar Amerika. Menyadari besarnya potensi pariwisata Indonesia sebagai penghasil devisa utama dan sebagai sumber penciptaan lapangan kerja yang cukup luas, maka kebijakan pembangunan yang mengarah pada investasi di bidang pariwisata terutama dari pihak swasta, baik nasional maupun swasta asing terus didorong dan bahkan diberikan berbagai kemudahan.

Bali sebagai salah satu pusat kegiatan pariwisata di Indonesia telah lama dikenal di manca negara dan menjadi andalan bagi pembangunan pariwisata Indonesia. Sejak dasa warsa awal abad ini pariwisata telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan ataupun pembangunan secara umum. Dengan demikian Bali identik dengan pariwisata sebagai salah satu “agent atau aktor” perubahan yang penting bagi masyarakat Bali. Dan setiap kita membicarakan pariwisata, baik di tingkat nasional maupun internasional, Bali selalu direfer, dijadikan acuan, dibahas, dikaji dan sering dijadikan contoh kasus berkenaan dengan dampak pariwisata terhadap kehidupan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungannya.

Di tengah-tengah krisis multidimensional yang dialami bangsa, dimana pariwisata daerah-daerah lain di Indonesia mengalami keterpurukan, pariwisata Bali sudah mengalami *recovery* dan bahkan kunjungan wisatawan manca negara pada dua tahun terakhir mencapai peningkatan sekitar 11,86% yaitu dari 1.355.799 pada tahun 1999 meningkat menjadi 2.140.944 pada tahun 2000, sehingga dampak krisis ekonomi di Bali tidak begitu terasa. Hal ini terjadi tentunya tidak terlepas dari potensi keunikan sosial-budaya dan keindahan alam yang dimiliki Bali, di samping faktor keamanan yang relatif lebih terjamin.

Adanya kondisi yang demikian menjadikan masyarakat lokal Bali menghadapi fenomena yang paradok. Di satu sisi dengan pariwisata orang Bali memperoleh manfaat ekonomi, di sisi lain dampak negatif pada aspek sosial, budaya dan kerusakan lingkungan juga dirasakan sebagai ancaman dan telah menimbulkan berbagai reaksi negatif yang sarat dengan konflik, sejalan dengan semakin deras arus migrasi yang masuk ke Bali untuk mencari nafkah.

Makalah ini akan menyoroti masalah kebijakan pembangunan pariwisata Bali dan konsekuensi-konsekuensi logis yang ditimbulkan dan sekaligus mencari solusi pemecahannya.

II. BUDAYA SEBAGAI MODAL DASAR PARIWISATA BALI

Berdasarkan motivasi perjalanan yang berarti juga potensi utama yang ditawarkan oleh daerah tujuan Veline Smith (1977) membedakan pariwisata menjadi lima jenis, yaitu: *environmental tourism*, *recreational tourism*, *historical tourism*, *ethnic tourism*, dan *cultural tourism*. *Recreational tourism* adalah pariwisata yang umumnya menawarkan *multiple S*: *sun, sea, sand, scenery* termasuk juga *sex*. *Environment tourism* adalah pariwisata yang didorong oleh motivasi untuk menikmati keindahan alam, baik yang alami seperti danau, gunung, lembah, air terjun, maupun buatan seperti teras persawahan dan taman permandian raja-raja di Bali. *Historical tourism* adalah pariwisata yang memfokuskan pada obyek benda-benda peninggalan atau aktivitas sejarah, seperti candi Borobudur, Pura Besakih, tembok (great wall) Cina, Piramid di Mesir dan sebagainya. *Ethnic tourism* adalah pariwisata yang menyajikan atraksi yang khas bagi suatu etnik tertentu, terutama etnik-etnik yang tergolong memiliki keunikan (eksotik) seperti, etnik Toraja, Badui, Suku Naga, Eskimo. Hampir mirip dengan *ethnic tourism* adalah *cultural tourism* dimana daya tarik utama yang ditawarkan oleh daerah tujuan adalah kebudayaan khususnya kesenian, religi, adat kebiasaan setempat.

Klasifikasi tersebut mempunyai banyak kelemahan, karena adanya ketumpatindihan. Misalnya *ethnic tourism*, *historical* dan *cultural tourism* dalam kenyataannya sering tidak dapat dibedakan karena kebudayaan dan masyarakat pendukungnya dan benda-benda budaya yang dihasilkan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Yang paling mendasar adalah bahwa motivasi kedatangan wisatawan ke suatu daerah sering tidak dapat diklasifikasi ke dalam salah satu motivasi di atas, melainkan gabungan dari beberapa motivasi. Seperti pada kasus pariwisata Bali, menawarkan gabungan dari kelima klasifikasi di atas dan bercampur menjadi satu.

Terlepas dari beberapa kelemahan klasifikasi itu, bahwa tipe pariwisata yang dikembangkan di Bali adalah pariwisata budaya, yaitu jenis pariwisata yang dalam perkembangan dan pengembangannya menggunakan kebudayaan daerah Bali yang dijiwai oleh agama Hindu yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional sebagai potensi dasar yang paling dominan, yang di dalamnya tersirat akan adanya hubungan timbal-balik antara pariwisata dan kebudayaan, sehingga keduanya meningkat serasi, selaras dan seimbang secara dinamis.

Penetapan pariwisata budaya sebagai tipe pariwisata yang dikembangkan, didasarkan atas potensi yang dimiliki oleh daerah Bali yaitu citra suku bangsa yang memiliki kebudayaan yang unik. Dan memang berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Tim Unud pada tahun 70-an saat pariwisata Bali baru dikembangkan, ditemukannya bahwa sebagian besar Wisman (61,78%) datang ke Bali karena tertarik pada kebudayaan, tertarik pada alam fauna dan flora 38,8 % dan sisanya karena motivasi lain-lain. Temuan tersebut akhirnya menjadi dasar dalam penentuan tipe pariwisata budaya yang akan dikembangkan di Bali. Dengan demikian *cultural capital* dijadikan sebagai modal utama dan memegang peranan dominan dalam pembangunan kepariwisataan di Bali (Pitana,1999).. Tanpa kebudayaan, tidak mungkin pariwisata Bali dapat bertahan secara berkelanjutan.

Pariwisata sebagai industri modern yang erat kaitannya dengan kegiatan teknologi, perdagangan dan transportasi, memiliki kekuatan global *globalizing force* untuk mengaburkan dan mendekatkan batas-batas antar negara dan daerah yang akhirnya akan tercipta sebuah “*global village* (McLuhan,1960 dan Rubinstein; 1999). Pariwisata memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan hal-hal yang baru (proses internasionalisasi) dan pada akhirnya masyarakat lokal akan menjadi “*Tourist society*”. Internasionalisasi lewat pariwisata khususnya pariwisata budaya, membawa masyarakat lokal terjepit di antara dua kutub kekuatan. Di satu pihak, mereka dituntut untuk melestarikan adat istiadat dan budayanya, sebagai komoditas yang dapat dijual dalam pariwisata; sementara di sisi lain internasionalisasi berarti membenturkan kebudayaan tersebut dengan dunia modern. Keadaan seperti ini menjadi faktor yang kuat bahwa budaya lokal akan hanyut dalam derasnya gelombang budaya global (Williams 1995;Crick 1989; Picard 1996, Naya Sujana,1999).

Pada kawasan wisata yang padat dan masyarakatnya berhubungan secara intensif dengan pariwisata (wisatawan), akan terjadi gejala touristifikasi, dimana pariwisata bukan lagi merupakan sesuatu yang ada di luar sana, melainkan sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat (Picard 1996; Pitana 1999). Dengan demikian masyarakat setempat bukan saja telah mewarisi tradisi lokal, tradisi besar dan budaya modern, tetapi juga telah mengadopsi budaya touristik dan dijadikan bagian integral dari kebudayaannya. Dalam proses itu pariwisata tidak lagi dapat dipandang sebagai faktor kekuatan luar penyebab perubahan kebudayaan, melainkan sudah menjadi bagian dari dinamika kebudayaan itu sendiri.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan pariwisata Bali, banyak kalangan baik praktisi maupun akademisi mengajukan pertanyaan, yaitu mampukah masyarakat Bali mempertahankan keutuhan tradisi dan kebudayaannya, dari intennya dobrakan budaya global?, dan jika ya sampai kapan budaya Bali mampu bertahan ?. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut ada yang bernada pesimistik, tetapi banyak juga yang bernada optimistik dan bahkan menyatakan bahwa kehadiran pariwisata telah

memperkuat proses konservasi, reformasi dan penciptaan kembali berbagai tradisi yang sebelumnya hampir punah.

Kalangan yang pesimistis menyatakan bahwa pariwisata (touristifikasi) menyebabkan adanya proses disorganisasi sosial, baik di tingkat keluarga maupun komunitas, yang pada gilirannya akan mengubah inti kebudayaan lokal (Bagus 1975).. Di samping itu ada kekhawatiran bahwa perkembangan kepariwisataan akan menyebabkan terjadinya pendangkalan kualitas kesenian, serta hilangnya kelompok-kelompok sosial yang telah terbukti mampu mempertahankan integrasi masyarakat. Lebih lanjut Dalton dan Picard (1990) menyatakan bahwa karena gejala komersialisasi sebagai salah satu dampak pariwisata telah menyusupi semua aspek kehidupan orang Bali, maka jelaslah sekarang bahwa jalinan sosial dan keagamaan orang Bali yang begitu kompleks, ketat dan rapi akan terpecah berai di bawah pengaruh pariwisata. Menurut Naaya Sujana (1990) kebudayaan lokal akan berangsur-angsur menjadi cair dan kemudian hanyut ke lautan budaya dunia yang semakin kuat dalam lalu lintas pariwisata . Kebudayaan Bali telah mengalami erosi yang ditandai dengan : 1) munculnya efek demonstrasi yang meliputi kecenderungan penduduk lokal untuk meniru gaya hidup wisatawan, semakin tingginya tingkat toleransi masyarakat terhadap perilaku menyimpang; 2) terjadinya komodifikasi terhadap kebudayaan 3) terjadinya penurunan kualitas hasil kesenian 4) terjadinya profanisasi kesenian sakral, kegiatan ritual dan tempat suci dan 5) semakin kecilnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap identitas kebalikannya (Picard 1990, Wood 1979).

Sejumlah kekhawatiran seperti yang terurai di atas memang cukup beralasan. Namun bukti-bukti empiris juga menunjukkan hal yang sebaliknya. Philip McKean (1973) menemukan bahwa pariwisata tidak merusak kebudayaan (kesenian), melainkan justru memperluas. Kepariwisataan pada kenyataannya telah memperkuat proses konservasi, reformasi dan penciptaan kembali berbagai tradisi dan kesenian yang disebut sebagai *cultural involution*. Interaksi orang Bali dengan wisatawan digambarkan sebagai hubungan yang saling mengharapkan dan menguntungkan tanpa merusak struktur masyarakat setempat Demikian juga Lensing (1974) menyatakan bahwa dampak kepariwisataan bersifat adaptif, bukan substitutif., tidak terjadinya transformasi secara struktural melainkan kebudayaan luar terintegrasi dengan kehidupan masyarakat setempat. Pariwisata telah mendorong tumbuhnya kesadaran orang Bali untuk melestarikan kebudayaan dan mendorong kreativitas dan revitalisasi berbagai bidang kesenian. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Mantra (1991)., Mabbett (1987) , bahwa perubahan sosial budaya yang terjadi di daerah pariwisata di Bali hanya terjadi pada lapisan luar yang terkait dengan peningkatan status ekonomi. Sedangkan pada lapisan dalam seperti dalam

aktivitas ritual dan upacara keagamaan, gotong royong suka-duka dan solidaritas masyarakat masih tetap lestari . Lebih lanjut dikatakan bahwa meskipun Kuta sebagai satu kawasan pariwisata yang sangat terkenal, sepiintas tampak telah kehilangan ke-Baliannya, namun sesungguhnya di tingkat *deep structure* kebudayaan Bali masih utuh. Situasi di Ubud bahkan jauh lebih baik keadaannya, dimana kehidupan pertanian dapat berdampingan secara serasi dengan *aktivitas* pertanian, sekalipun sebagian besar penduduknya terserap pada kegiatan=kegiatan yang terkait dengan pariwisata..

Pitana (1995,1999) juga mengemukakan bahwa kebudayaan Bali hingga kini masih melekat kuat pada identitas orang Bali, dan kekhawatiran akan tercerai-berainya simpul-simpul kebudayaan Bali tidak terbuti.. Struktur sosial masyarakat Bali masih memiliki daya lentur yang kuat dan ketahanan yang dinamis dalam menghadapi perubahan lingkungan. Dan bahkan keberadaan serta fungsi organisasi sosial tradisional (banjar dan desa adat di kawasan wisata semakit baik dan mantap sejalan dengan semakin baiknya kondisi ekonomi masyarakat.

Terlepas dari perbedaan pandangan dan temuan berkenaan dengan dampak pariwisata terhadap kebudayaan Bali, (identitas ke “Balian” orang Bali), tersebut di atas, secara empiris tidak dapat dipungkiri pula bahwa pada satu dekade rbelakangan ini rasa kebalian orang Bali mulai terusik, dan terlukai oleh ulah para pelaku pariwisata dan investor luar yang dianggap telah melakukan berbagai pelecehan budaya dan agama Hindu demi untuk kepentingan ekonomi semata ..

Kasus yang dianggap sebagai pelecehan terhadap budaya dan agama Hindu yang mendapat reaksi keras dari orang Bali yaitu , pertama digunakannya simbol-simbol agama yang dianggap sakral/suci (Barong) ditempat yang tidak semestinya. Dalam hal ini tempat yang dimaksud adalah sebuah tempat yang ditengarai oleh masyarakat akan digunakan untuk kegiatan hiburan malam dan tempat transaksi seks. Kedua adalah kasus promosi yang dilakaukan oleh investor di salah satu tabloid Bali Kini yang menempatkan “ sesari bola golf “ di atas “canang sari” sebuah sarana upacara pengting bagi umat Hindu di Bali, yang kasusnya sampai kepengadilan.

Sedangkan kasus yang dianngap telah melanggar ketentuan Bhisama yaitu pembangunan monumen Garuda Wisnu Kencana (GWK) yang tingginya melebihi tingginya salah satu tempat suci (pura Dang Kahyangan) yang disucikan umat Hindu. Keberadaan monumen tersebut tingginya jauh melebihi tingginya pura dan juga jarak nya sangat dekat dengan pura tersebut, dianggap akan dapat merusak dan mencemarkan kesucian pura tersebut..Demikian juga pembangunan pasilitas pariwisata (hotel dan lapangan golf) Bali Nirwana Resort (BNR) yang jaraknya sangat dekat

dengan dengan pura Dang Kahyangan yang dianggap akan dapat mencemarkan kesucian pura dan mengganggu kegiatan upacara umat Hindu.. Di samping itu pembangunan fasilitas ini menggunakan tanah pertanian yang sangat subur, dan boros air yang pada gilirannya nanti akan dapat menghilangkan mata pencarian penduduk setempat. Kasus yang serupa juga terjadi pada proyek pembangunan reklamasi pulau Serangan *Bali Turtel Island Development* (BTID) yang dampaknya masih terasa hingga kini yaitu terjadinya pemiskinan masyarakat setempat karena kehilangan mata pencaharian dan kerusakan lingkungan (abrasi) di sepanjang pantai timur pulau Bali.

Rencana pembangunan ketiga Mega Proyek tersebut, sekalipun telah mendapat reaksi penolakan yang sangat luas di kalangan orang Bali, ternyata mega proyek tersebut tetap berjalan dengan menapik keinginan dan aspirasi masyarakat setempat. Kenyataan ini ada, tentu tidak terlepas dari arah kebijakan pembangunan pada masa itu yang sangat sentralistik, kapitalis dan lebih berpihak pada keinginan para investor.

-
- Bhisama atau fatwa adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) berkenaan dengan rambu-rambu radius pembangunan pasilitas pariwisata di suatu area yang ada pura-pura besar yang tergolong sebagai pura Dang Kahyangan atau Sad Kahyangan.

III.PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN

Perkembangan industri pariwisata di Bali tidak dapat dipisahkan dengan penyediaan fasilitas prasarana dan sarana fisik. Dalam upaya penyediaan fasilitas itu, pemanfaatan lahan, termasuk lahan pertanian produktif tidak dapat dihindari sehingga perubahan atas fungsi tanah dari tanah pertanian ke fungsi non pertanian terus berlangsung.

Pulau Bali adalah pulau kecil yang memiliki luas hanya 5.632,86 km² dan dihuni oleh penduduk sebanyak 2.904,828 jiwa dengan kepadatan 516 jiwa/km² dan penambahan penduduk sekitar 0,87% (Susenas 1996). Sedangkan luas lahan pertanian yang dimiliki juga relatif sempit yakni lahan sawah 89.116,45 hektar dan lahan non sawah 474.169,55. Jumlah lahan pertanian tersebut dari tahun ketahun semakin berkurang yang diakibatkan oleh adanya alih fungsi ke lahan non pertanian seperti untuk pembangunan pasilitas pariwisata (hotel, restoran dan lapangan golf), untuk pemukiman, pasilitas pendidikan, jalan dan prasarana lainnya. Diperkirakan sejak satu dekade ini pesatnya perkembangan pariwisata Bali telah

menyebabkan terjadinya alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian rata-rata 1000 hektar pertahun.

Sesungguhnya secara tradisional orang Bali telah memiliki kearifan budaya dalam memelihara dan melestarikan lingkungannya yang dikenal dengan konsep *Tri Hita Karana*, yang berarti tiga penyebab kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan dsbnnya. Konsep ini memberikan arah kepada orang Bali bahwa untuk mencapai kebahagiaan atau kesejahteraan, mereka harus melakukan hubungan secara serasi dan seimbang dengan lingkungannya, dengan sesamanya dan dengan Tuhannya

Dalam konteks pemanfaatan lingkungannya orang Bali juga senantiasa menggunakan konsep-konsep seperti konsep *Nyegara-Gunung, Asta-Kosali, Tri-Mandala dan Tri Angga* sebagai instrumen untuk mencapai keseimbangan mulai dari pulau sebagai ekosistem makro sampai ke ekosistem mikro seperti kota desa dan keluarga. Keseluruhan konsep tersebut pada intinya mengandung nilai-nilai keseimbangan dan keharmonisan antara hal-hal yang bersifat material dan spiritual.

Disadari bahwa bagi kepariwisataan Bali, keunikan lingkungan adalah aset wisata yang tak ternilai harganya. Namun keunikan tersebut justru semakin tergerus oleh hegemoni kapitalis dan homogenisasi model pembangunan pariwisata skala besar yang “lapar lahan” yang hanya menekankan pada aspek ekonomi semata. Strategi semacam ini memiliki batas waktu yang amat pendek. Sumberdaya dan lingkungan Bali telah mengalami tekanan yang amat luar biasa. Pencemaran limbah domestik dan industri, terkontaminasinya sumber air penduduk (sumur), semakin semerautnya tata ruang, dan kemacetatan lalu lintas, merupakan realitas masalah yang semakin sulit dikendalikan..

Alih fungsi lahan dari tanah pertanian ke non pertanian khususnya untuk pembangunan fasilitas pariwisata secara ekonomis dan dalam jangka pendek sangat menguntungkan para petani. Hal ini terjadi karena para petani dapat menjual tanahnya dengan harga tinggi. Namun bersamaan dengan itu bagi para petani yang tidak mempunyai ketrampilan di bidang pariwisata atau usaha lain, tidak sedikit yang merasa kehilangan pekerjaan dan bahkan hasil penjualan tanahnya tidak digunakan untuk kegiatan yang produktif malah sangat konsumtif, sehingga mereka kehilangan segalanya dan menjadi miskin. Industri pariwisata menjadi fenomena paradoksal, memunculkan gaya hidup konsumtif.

Sebetulnya, tanah bagi masyarakat Bali bukanlah semata-mata barang yang hanya mempunyai fungsi ekonomis. Tanah mempunyai fungsi non ekonomis yang tidak kalah pentingnya dari pada fungsi ekonomi. Bagi orang Bali, berbicara tentang tanah berarti langsung berbicara tentang eksistensi dirinya yang terkait erat dengan kehidupan sosial, budaya dan keagamaan. Secara simbolik tanah juga sering dianggap sebagai “Ibu” yang memberi

berkah kemakmuran, tempat untuk meminta perlindungan dan kekuatan. Dengan kata lain semua tanah di Bali berhubungan langsung dengan tradisi keagamaan, yang termanifestasikan dalam berbagai bentuk hak-hak dan kewajiban kewajiban yang mengikat baik terhadap kerabat, klen/dadia maupun komunitas. Oleh sebab itu pemutusan hubungan orang Bali dengan tanahnya juga berarti mencabuti ikatan-ikatan kekerabatan itu.

Menurut Bagus (1996) tanah khususnya bagi petani di Bali memiliki fungsi yang sangat penting karena : 1) berhubungan dengan agama, yaitu dalam pelaksanaan upacara, 2) merupakan tempat pemukiman warga banjar/desa, 3) berhubungan dengan kekerabatan atau keluarga dan 4) sebagai sumber mata pencaharian. Adanya fungsi tanah yang demikian itu, membentuk jalinan hubungan sosial yang saling tergantung, baik dalam aktivitas ekonomi, kekerabatan maupun keagamaan. Mewariskan tanah sebagai harta pusaka, juga berarti mewariskan kewajiban-kewajiban baik untuk kesejahteraan keluarga maupun untuk kegiatan upacara siklus hidup, pemujaan leluhur dan pemeliharaan pura keluarga.

Adanya multi fungsi tanah dalam masyarakat Bali yang demikian, menyebabkan tanah sering menjadi sumber konflik di masyarakat, baik antar anggota keluarga, antar anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan investor. Dalam situasi kekinian yang transformasi sosial-budaya-ekonomi terjadi begitu cepat sejalan dengan pesatnya perkembangan pariwisata Bali, konflik tanah antara masyarakat dengan pihak luar (investor) lebih menonjol dan semakin tinggi eskalasinya. Beberapa kasus konflik tanah yang masih belum terselesaikan hingga ini yang melibatkan investor dengan penduduk setempat antara lain, kasus pulau Serangan, BNR, Pecatu Graha, Four Sesson Hotel. Munculnya konflik yang demikian umumnya karena masyarakat merasa dirugikan dalam proses pengalihan hak milik dan ketidakonsistenan investor terhadap kesepakatan yang dibuat sebelumnya, seperti penentuan harga tanah, kompensasi pekerjaan atas hilangnya pekerjaan mereka karena alih fungsi tanah.

Gejala semakin meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian khususnya untuk pembangunan fasilitas pariwisata serta sarana dan prasarana lainnya yang mencapai rata-rata 1000 ha pertahun di samping memberikan mamfaat ekonomi yang cukup luas bagi masyarakat dan pemerintah khususnya PAD, juga telah menimbulkan masalah yang cukup mengawatirkan terutama pada aspek kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan dan daya dukung lingkungan. Keadaan ini akan menjadi lebih parah lagi ketika pengembangan kawasan wisata baru di 21 kawasan wisata yang tersebar di seluruh kabupaten di Bali sesuai dengan SK gubernur No.526 tahun 1993 terealisasi. Sebab dalam setiap pengembangan kawasan wisata baru yang berskala besar dan lengkap, sering memerlukan lahan relatif luas, rata-rata di atas ratusan hektar.

Pengembangan kawasan wisata model itu, di samping membutuhkan lahan yang luas, juga membutuhkan modal yang besar, sehingga masuknya sistem kapitalisme dengan penggunaan modal asing menjadi tidak terhindarkan. Jika sistem kapitalisme menjadi bagian dalam pengembangan industri pariwisata Bali, maka fundamental ekonomi dan budaya Bali akan semakin rapuh, yang pada gilirannya dapat mengendalikan aspek kehidupan orang Bali (Bagus, 1996, Naya Sujana, 1997). Selain itu semakin habisnya lahan-lahan pertanian subur untuk fasilitas pariwisata menyebabkan subak sebagai organisasi fungsional petani akan ikut hilang. Padahal kita tahu bahwa sawah pertanian dan Subaknya di samping merupakan daya tarik bagi wisatawan juga merupakan salah satu organisasi yang memegang andil besar bagi pelestarian budaya Bali. Dengan demikian upaya mengendalikan kecenderungan seperti itu menjadi tantangan masyarakat di masa depan.

Pengembangan fasilitas pariwisata yang berskala besar, seperti proyek reklamasi pulau Serangan (BTID) dengan mengurug laut seluas lebih dari 200 hektar telah menyebabkan puluhan hektar sawah petani di sepanjang pantai timur pulau Bali hilang percuma karena abrasi., ratusan kepala rumah tangga dan ibu-ibu nelayan di Serangan kehilangan mata pencaharian, dan juga puluhan hektar pohon bakau sebagai paru-paru Bali juga ikut musnah.. Demikian juga proyek BNR yang dibangun di atas lahan subur dengan lapangan golfnya yang boros air akan menjadi beban lingkungan tersendiri bagi Bali di masa depan. Dan menurut perkiraan bahwa lima tahun mendatang Bali khususnya Kodya Denpasar dan kabupaten Badung sebagai destinasi pariwisata paling padat di Bali akan menghadapi krisis air bersih, jika tidak diantisipasi secara dini akan menimbulkan masalah bagi pariwisata itu sendiri.

Masalah tersebut diperparah lagi oleh perilaku pelaku pariwisata dan pencari kerja yang berasal dari luar Bali, yang cenderung kurang peduli terhadap kelestarian Bali dan hanya menjadikan Bali sebagai sapi perahan.

Untuk mengantisipasi semakin tingginya tekanan terhadap lingkungan, tanpa harus menyetop investasi di bidang pariwisata, maka pengembangan pariwisata yang lebih ramah lingkungan, dan dapat memberi manfaat lebih tinggi kepada masyarakat mutlak diperlukan. Sehubungan dengan itu pengembangan wisata desa terpadu yang berskala kecil, yang melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat setempat, dapat menjadi alternatif.

Desa wisata didefinisikan sebagai suatu wilayah pedesaan dengan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian “desa Bali” baik dari struktur tata ruang, arsitektur bangunan., maupun pola kehidupan sosial budaya masyarakat, serta mampu menyediakan komponen-komponen

kebutuhan pokok wisatawan seperti akomodasi, makanan dan minuman, cindramata dan atraksi-atrasi wisata.

IV.DISTRIBUSI MANFAAT PARIWISATA BAGI RAKYAT

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sangat menyadari potensi pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan Bali. Dalam setiap repelita pariwisata selalu ditempatkan pada prioritas utama secara sektoral, bersama-sama dengan sektor pertanian dan industri kecil. Dalam setiap repelita pariwisata Bali diarahkan pada peningkatan penerimaan devisa, pendapatan daerah dan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, mendorong kegiatan ekonomi rakyat, dan pelestarian budaya dan lingkungan alam. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan kegiatan dan usaha ekonomi masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut kebijaksanaan pembangunan pariwisata yang ditempuh antara lain : 1) melanjutkan pembangunan pariwisata budaya yang berwawasan lingkungan; 2) meningkatkan pemerataan pariwisata ke seluruh pelosok daerah Bali; 3) meningkatkan kualitas sumberdaya, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik dan atraksi wisata maupun obyek wisata dan 4) meningkatkan peran serta masyarakat dan kalangan usaha pariwisata dalam pengembangan pembangunan pariwisata.

Belajar dari berbagai pengalaman masa lalu, dikaitkan dengan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada , maka dengan kebijakan tersebut di atas perkembangan pariwisata Bali dan sektor terkait dalam setiap repelita mengalami perkembangan yang menggembarakan. Dalam repelita IV (1984-1989) jumlah kunjungan wisatawan naik rata-rata 16,3% dan pada pelita V (1989-1992) naik rata-rata 19,90% pertahun. Dan jika dihitung dari tahun 1990-2000 kunjungan wisatawan yang langsung ke Bali naik rata-rata 14,92%. Dan menurut catatan dinas pariwisata Bali,2000, kunjungan wisatawan ke Bali sebanyak 2.140.944 orang.

Sehubungan dengan tingginya kunjungan wisatawan keBali maka, pariwisata memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian Bali. Erawan (1987;1993) dengan meyakinkan menyatakan bahwa pariwisata mempunyai peranan positif dalam penciptaan pendapatan bagi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, sebagai sumber pengasil devisa, mendorong ekspor khususnya barang hasil industri kerajinan dan mengubah struktur perekonomian Bali kearah yang lebih berimbang. Lebih lanjut dia menyatakan bahwa sektor pariwisata akan tetap menjadi sektor pemimpin (leading sector) dalam pembangunan ekonomi daerah Bali di masa-masa

mendatang. Hal senada juga ditemukan oleh Pitana (1992) bahwa pariwisata telah menjadi generator penggerak dalam pembangunan Bali, paling tidak dalam dua dasa warsa terakhir.

Besarnya peranan pariwisata dalam perekonomian Bali memang tidak dapat dibantah. Menurut Erawan (1993) pada tahun 1992 peran sektor pariwisata terhadap pendapatan masyarakat diperkirakan sekitar 35 %. Menurut Antara dan Parining (1999), pariwisata mempunyai keterkaitan ekonomi yang sangat erat dengan banyak sektor, melalui apa yang disebut open-loop dan induced-effect atau multiplier effect.. Dan dengan menggunakan model SAM (Social Accounting Matrix), ditemukan bahwa pengaruh pengeluaran wisatawan sangat significant terhadap denyut nadi perekonomian Bali, dalam puluhan sektor.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang ditemukan Erawan (1999), bahwa pada tahun 1998 dampak pengeluaran wisatawan terhadap pendapatan masyarakat mencapai 45,3% dan dampak dari investasi dalam pariwisata mencapai 6,3%. Jadi secara total pariwisata menyumbang sebesar 51,6 % terhadap pendapatan masyarakat Bali. Sedangkan dari segi pendapatan pemerintah, PAD yang bersumber dari PHR yang tersebar di seluruh kabupaten di Bali pada tahun 1999 mencapai angka 264,83 milyar rupiah.

Sedangkan dari segi penyerapan tenaga kerja pada tahun (1998) juga besar yang mencapai 38% dari seluruh kesempatan kerja di Bali . Secara lebih mikro Mandra (1999,dikutif dari Pitana,2001) memberikan data bahwa dari keseluruhan tenaga kerja yang terserap di kawasan pariwisata Nusa Dua, 87% adalah orang Bali dengan rincian masing-masing 21% orang dari desa Benoa dan 66% orang Bali dari luar Benoa.

Di samping angka-angka kuantitatif di atas, observasi kualitatif juga memberikan simpulan serupa, bahwa pariwisata telah menjadi mesin penggerak pembangunan Bali. Pariwisata telah menyumbang terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Bali, bukan saja terhadap orang yang terlibat langsung dengan pariwisata, tetapi juga pada sektor-sektor lain yang tidak terlibat langsung, seperti industri kerajinan barang cendramata, komoditas pertanian, pertukangan dsbnya. Ketika terjadi kasus-kasus yang menyebabkan penurunan kedatangan wisatawan secara drastis seperti perang Teluk tahun 1990, dan adanya isu kolera di Bali ternyata gerak ekonomi masyarakat Bali juga mengalami stagnasi. Stagnasi ini bukan saja terjadi di daerah-daerah yang terkenal sebagai kawasan pariwisata, melainkan sampai ke desa-desa yang kelihatannya tidak ada hubungan langsung dengan pariwisata.

V.PENUTUP

Pariwisata telah menjadi mesin penggerak utama dalam derap pembangunan ekonomi dan dinamika sosial budaya Bali. Secara ekonomis dampak pengeluaran wisatawan terhadap pendapatan masyarakat sangat tinggi, mencapai 43% pada tahun 1998 dan dampak dari investasi dalam pariwisata sekitar 6,3% (Erawan) . Demikian juga dalam penyerapan tenaga kerja pada tahun yang sama secara regional mencapai 38% dari seluruh kesempatan kerja di Bali.

Pariwisata Bali telah menjadi fenomena global yang mempertemukan budaya lokal dengan dunia internasional, sehingga terjadi proses internasionalisasi. Pada destinasi yang sudah berkembang mantap seperti Kuta dan Ubud, telah terjadi proses touristifikasi pada masyarakatnya sehingga kawasan ini telah menjadi sebuah desa global *Global village* (McLuhan,1960 dan Raechelle,1999). Dengan adanya proses ini, pariwisata sudah menjadi bagian integral dari kebudayaan lokal. Dengan demikian dalam proses itu , pariwisata bukan lagi sesuatu yang ada “di laur sana” . (Pitana, 2001). Namun di samping proses internasionalisasi yang arahnya *centripetal* , secara bersamaan terjadi proses yang arahnya *centrifugal*, dimana masyarakat semakin *reflexive* dengan kebudayaannya sendiri. Kebudayaan dan berbagai tradisi lama yang dimiliki diinterpretasi, direkonstruksi sehingga muncul ‘invented tradition’. Dengan perkataan lain, bukan hal yang mustahil proses modernisasi berjalan secara bergandengan dengan proses tradisionalisasi, dan proses internasionalisasi dan touristifikasi berjalan seiring dengan indigenisasi. Fenomena itu tampaknya telah terjadi di Bali dan pariwisata telah menjadi patron baru dalam mempertahankan eksistensi dan merevitalisasi berbagai jenis kesenian.

Di samping dampak positif dari pariwisata yang digambar di atas, tidak terpungkiri pula bahwa tampak sisi-sisi kelam yang dialami dan dirasakan orang Bali saat ini. Sisi-sisi kelam yang dimaksud terutama berkaitan dengan keamanan dan rasa aman, ketertsesakan dan kepengapan ekologis dan tekanan psikologis atas semakin berjubelnya pendatang “haram” yang datang dan tinggal di Bali. Berita pencurian, perampokan, penodongan dan pembunuhan yang bermotif ekonomi yang dulu begitu langka, kini menjadi sesuatu yang rutin menghiasi berita media massa setempat, Pencurian terhadap benda-benda sakral (pretima) di pura-pura yang semakin sering terjadi telah membekaskan rasa benci dan curiga orang Bali terhadap etnis luar. Demikian juga kemacetan dan kesemerautan lalu lintas, kesemerautan tata ruang, rumah-rumah kumuh dan pedagang osongan telah mengubah wajah Bali menjadi pengap dan kumuh. Semakin berjubelnya pencari kerja dari luar dengan latar multi etnis, semakin dirasakan oleh orang Bali sebagai ancaman atas eksistensi dan kesempatan kerja yang ada. Semakin merebak dan transparannya praktek praktek pelacuran yang umumnya bukan orang Bali, dan semakin meluasnya

penggunaan obat-obat terlarang di kalangan masyarakat juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pariwisata itu sendiri. Tekanan psikologis dan potensi konflik semacam ini jika tidak cepat diantisipasi, tentu akan dapat merusak citra Bali sebagai daerah tujuan wisata yang utama, yang pada gilirannya juga merugikan Indonesia secara keseluruhan.

Untuk mencegah agar potensi konflik yang laten itu tidak menjadi manifes, maka segenap komponen pariwisata dan masyarakat Bali semestinya berkerja sama bahu membahu.. Lebih kecil lagi bagaimana memperkecil potensi konflik itu dengan berbagai tindakan preventif.

Untuk mencapai pembangunan pariwisata Bali yang berkelanjutan, implementasi paradigma pariwisata kerakyatan , dan pariwisata terpadu berskala kecil yang melibatkan sebanyak mungkin partisipasi penduduk setempat hendaknya sungguh-sungguh dipegang. Disamping itu penerimaan in-migrasi ke Bali secara selektif, melalui mekanisme peraturan dan hukum perlu dilakukan.

PUSTAKA ACUAN

- Bagus IGN, 1975. Sanur dan Kuta : ***Masalah Perubahan Sosial di Daerah Pariwisata***” dalam IGN Bagus (ed). Bali dalam Sentuhan Pariwisata. Denpasar. Fakultas Sastra Unud, pp 95-109.
- Diparda Bali, 1990. Bali Tourism Statistic
- Erawan I Nyoman, 1987. **Peranan Pariwisata dalam Perekonomian Bali: Efek Penggandaan Pengeluaran Wisatawan Terhadap Pendapatan Masyarakat**. Desertasi, Universitas Gajah Mada.
- Erawan I Nyoman, 1993. “***Pariwisata dalam kaitannya dengan Kebudayaan dan kepribadian Bangsa***”. Dalam TR Sudartha, dkk (ed). Kebudayaan dan Kepribadian Bangsa. Denpasar, Upada sastra, pp 282-299.
- Geriya I Wayan dan Erawan I Nyoman, 1987. ***Interaksi Dinamik antara Pariwisata dan Sosial Budaya secara Lintas Sektoral (perspektif Sosial Ekonomi)***. Peper pada Seminar Jubilium Perak Universitas Udayana, Denpasar.
- Godfrey, 1993 “***A Review of Tourism Alternative***”. Annual of Tourism Reseawt. Vol 20 (3): 610-613.
- Geertz, Clifford, 1973. **The Interpretation of Culture**. New York: Basic Books.
- Greenwood, Davydd J, 1972. “***Tourism as an Agent of Change: A Spanish Basque Case***” Ethnology. Vol XI (I) 80-91.
- Lanfant al, 1995 (eds). **International Tourism Identity and Change. International Soscology**, London, New Delhi.
- Mantra IN, dkk, 1989. **Potensi Kebudayaan Bali dalam Pembangunan**. Laporan Penelitian. Denpasar, Universitas Udayana.
- McKean (1973) “**Cultural Involution : Tourist, Balinese, and the process of Modernization in Anthropological Perspective**”. Ph.D disertation. Brown University.
- Naya Sujana, Nyoman, 1999. “***Kompleksitas dan Dinamika di Tengah Bangunan Kebudayaan Bali***”, Dalam Wayan Supartha (ed), Bali dan Masa Depan. Penerbit :PT BP, pp 37-59.
- Noronha, R, 1979 “***Paradise Revisited***”. Dalam E. d. Kadt (edI, Tourism, Passport to Development. Oxford, Oxford University Press, 177-204.
- Picard, M, 1990. “***Kebalian Orang Bali: Tourism and the Uses of “ Balinese Culture***” In New Order Indonesia” Review of Indonesian and Malaysian Affairs. Summer 1990, 1-30.
- Pitana. I Gede, 1999. **Pelangi Pariwisata Bali**. Penerbit BP.
- Pitana, I Gede, 2001 “***Potensi Konflik, Adat-Budaya dan Pariwisata Bali***”. Makalah dalam Seminar “ Ancaman Potensi Konflik terhadap Pariwisata Bali “ Hotel Sahid Kuta, 17 Mei 2001. Diselenggarakan oleh Yayasan Tri Hita Karana Bali.
- Pitana, I Gede (ed), 1994. **Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali**. Penerbit BP.

Rubinstein Reachelle & Linda H Connor (eds), 1999. **Staying Local in the Global Village: Bali in the twentieth Century**. Honolulu. University of Hawaii Press.